



## IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Lina Rosana <sup>1)</sup>; Risma Wira Bharata <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> [linarosana9@students.untidar.ac.id](mailto:linarosana9@students.untidar.ac.id), Universitas Tidar

<sup>2)</sup> [pakrismawb@gmail.com](mailto:pakrismawb@gmail.com), Universitas Tidar

\*penulis korespondensi

### Abstract

*The purpose of this study is to analyze the effect of the implementation of PP No. 71 of 2010 concerning accrual-based Government Accounting Standards (SAP) on the quality of financial statement presentation. This research uses library research method or literature review. This research is useful for expanding the knowledge of the public or SKPD in knowing whether SAP has an effect on the quality of the presentation of financial statements and whether the application of PP No. 71 of 2010 has been implemented in the process of presenting government financial statements. This study provides subjective conclusions regarding the implementation of accrual-based SAP in financial statements from previous researchers, which proves that SAP greatly affects the quality of government financial statement presentation. However, the application of PP No. 71 of 2010 regarding accrual-based SAP has not been fully implemented in the process of presenting financial statements, be it in local or central governments. Because there are several obstacles such as the readiness of human resources, governance, and other obstacles. However, there are certain strategies to overcome these obstacles.*

**Keywords:** PP No. 71 of 2010, Government Accounting Standards (SAP), Quality of Financial Statement Presentation

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual terhadap kualitas penyajian laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Adapun penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan masyarakat ataupun SKPD dalam mengetahui apakah SAP berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan serta apakah penerapan dari PP Nomor 71 Tahun 2010 telah terlaksana pada proses penyajian laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini memberikan kesimpulan subjektif mengenai implementasi SAP berbasis akrual pada laporan keuangan dari peneliti terdahulu, yang membuktikan bahwa SAP sangat mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah. Namun untuk penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai SAP berbasis akrual belum sepenuhnya diterapkan dalam proses penyajian laporan keuangan, baik itu di pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Karena terdapat beberapa kendala seperti kesiapan SDM, tata Kelola pemerintahan, dan kendala lainnya. Namun tetap terdapat strategi tertentu untuk mengatasi kendala tersebut.

**Kata Kunci:** PP Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kualitas Penyajian Laporan Keuangan.

## PENDAHULUAN

Sepanjang berjalannya waktu, akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia berkembang sangat melesat terutama dalam era reformasi pada kebijakan pemerintah serta desentralisasi fiskal yang terfokuskan di pemerintah daerah. Selain itu, setiap Negara juga dituntut untuk dapat berkembang dan bersaing secara global. Untuk dapat mewujudkan daya saing tersebut tentunya dimulai dari yang paling dasar, yaitu pemerintah daerah. Dimana adanya persaingan tersebut menggiring Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kemandirian daerah. Di Indonesia, pertumbuhan akuntansi sektor publik merupakan wujud keharusan akuntabilitas lembaga sektor publik di Indonesia. Karena akuntabilitas merupakan sebuah keharusan dalam pertanggungjawaban pencapaian berhasil atau tidaknya suatu organisasi pada visi misi yang hendak dicapainya (Juwita, 2013).

Suatu pemerintahan yang bagus yaitu pemerintahan yang tanggap, dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta memiliki performa (Nasution, 2019). Akuntabilitas akan dapat dicapai jika pemerintah bisa menciptakan kondisi *good governance*. Penerapan *good*



*governance* bisa membuat pemerintah melaksanakan otonomi daerah, yang akhirnya akan memerlukan peraturan terkait cara mengelola keuangan daerah maupun negara. Secara umum, ada dua dasar penerapan dalam akuntansi yaitu menggunakan basis kas (*cash basic*), dan basis akrual (*accrual basic*). Basis kas (*cash basic*) adalah basis pertama yang dipakai oleh satuan kerja pemerintah sehingga saat ini masih sering digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Agar terperolehnya pelaporan keuangan yang berkualitas maka dalam melaporkan keuangan pemerintah harus menggunakan standar akuntansi yang baik serta benar karena penyelenggaraan tersebut penting. Karena kualitas dari laporan keuangan adalah bagian dari tanggungjawab kepada masyarakat. Dari hal tersebut, dasar perhitungan yang dapat digunakan harus benar-benar diperhatikan. Oleh karena itu, penegasan yang sesuai untuk masalah tersebut adalah dikeluarkannya sebuah peraturan yang resmi (Yafie, 2013).

Indonesia termasuk lambat dalam memperkenalkan akuntansi basis akrual (*accrual basic*), serta memiliki masa tenggang pada akuntansi basis akrual (*accrual basic*) ini. Pada pengelolaan laporan keuangan, salah satunya berkaitan dengan pencatatan keuangan untuk setiap instansi pemerintahan daerah maupun pusat dengan berbasis akrual (*accrual basic*). Hal tersebut sudah diatur pada UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 36 ayat 1 terkait keuangan negara dengan penjabaran pelaksanaan paling lambat 5 tahun pada pengakuan serta pengukuran pendapatan dan pengeluaran berbasis akrual (*accrual basic*). Sebagai jembatan antara akuntansi kas dengan akuntansi akrual dalam akuntansi pemerintahan. Pemerintah menerbitkan PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berisi penerapan basis kas (*cash basic*) menuju akrual (*cash toward accrual*). Kemudian tak lama diterbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 pada bulan Oktober Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual (*accrual basic*) yang menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005, tujuan pergantian tersebut yaitu terciptanya pedoman yang lebih baik pada pelaksanaan penawaran akuntansi negara. Dalam masa empat tahun, semua persiapan dalam penerapan akuntansi basis akrual (*accrual basic*) diharapkan mampu menjajarkan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia (NST, 2016).

Salah satu manfaat dari laporan keuangan pemerintah daerah yaitu untuk mengambil keputusan dari pihak yang berwenang misalnya pemerintah pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), ataupun masyarakat. Sehingga manfaat yang diperlukan pada informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat disesuaikan. Relevan, meyakinkan, bisa dibandingkan, dan bisa dipahami merupakan syarat karakteristik kualitatif yang terdapat pada PP Nomor 71 tahun 2010 terkait SAP yang wajib ada pada laporan keuangan pemerintah sebagai informasi akuntansi (Yuliani & Agustini, 2018).

Juwita (2013) mengemukakan dalam penelitian bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitiannya memberikan bukti empiris bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat sebagai mana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selaras dengan penelitian dari Widyawati (2018) mengemukakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sidoarjo sudah sangat efektif, sedangkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo pun sudah sangat berkualitas. Hasil yang sama didapatkan pada penelitian Jati (2019) mengemukakan bahwa uji analisis diperoleh bahwa kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dipengaruhi oleh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual. Hasil ini dibuktikan dengan proksi penerapan SAP Akrual memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap proksi Opini BPK.



Suprihatin & Ananthi (2019) mengemukakan bahwa Intensitas standar akuntansi pemerintah berhubungan positif dengan laporan keuangan. Hal ini bisa disimpulkan bahwa dengan penerapan standar akuntansi pemerintah telah berjalan dengan baik maka kualitas laporan keuangan pun akan baik pula. Penerapan standar akuntansi pemerintah yang menggunakan basis akrual masih belum bisa diterapkan di beberapa daerah, karena pemahaman mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sangat berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Akuba (2013) mengemukakan dalam penelitiannya yang bertujuan mengetahui apakah Pemerintah Kota Gorontalo telah menaikkan standar akuntansi pemerintahan sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010. Hasil survey menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan Kota Gorontalo belum bisa menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010. Hasil survei ini sama dengan Kota Bitung Langelo et al (2015) yang menunjukkan bahwa PP Nomor 71 Tahun 2010 belum dilakukan sepenuhnya karena adanya hambatan seperti belum siapnya jumlah sumber daya manusia yang berkompeten.

Saat menyusun laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk laporan keuangan sangat memerlukan adanya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Ramadhan, 2019). Dilihat dari pengetahuan masyarakat ataupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pejabat yang berkaitan dalam mempersiapkan laporan keuangan dan sejenisnya belum memahami secara betul bagaimana Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dapat digunakan untuk memperoleh laporan keuangan dengan kualitas tinggi. Dari hal itu perlunya pembahasan, pengkajian, dan penelitian lebih dalam. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat atau Satuan Kerja perangkat daerah (SKPD) dan pegawai pemerintahan akan bermanfaatnya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang menjadi pedoman untuk kualitas penyajian laporan keuangan. Dari permasalahan tersebut, peneliti dalam artikel ini akan menganalisis tentang implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 terhadap kualitas penyajian laporan keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti terdahulu menganalisis kota atau kabupaten yang menjadi objek penelitiannya, namun penelitian ini sebatas mengkaji ulang artikel dari peneliti terdahulu kemudian menarik kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan. Dengan menggunakan metode *library research* atau kajian pustaka, penelitian ini nantinya akan tersedia dalam bentuk kesimpulan subjektif dari penelitian sebelumnya terkait implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual (*accrual basic*) terhadap kualitas penyajian laporan keuangan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi pemerintah merupakan kegiatan yang memberi pelayanan dalam menyediakan informasi keuangan pemerintah pada proses mencatat, pengikstisan, mengklarifikasikan transaksi keuangan pemerintah dan kegiatan menafsirkan informasi keuangan tersebut. akuntansi pemerintah merupakan bagian dari Akuntansi Sektor Publik (ASP). ASP menjelaskan bahwa laporan keuangan harus mampu mempunyai manfaat dalam membuat suatu keputusan yang tepat dan dapat digunakan untuk penilaian akuntabilitas.

Adapun tujuan dari sektor publik tercantum dibawah ini :

- a. Memberi informasi tentang kecukupan pendapatan dari periode berjalan untuk menutupi semua biaya.
- b. Memberikan informasi tentang sumber dana, distribusi, dan penggunaan.
- c. Pengungkapan dari kegiatan perusahaan pelapor dan hasilnya terkait penggunaan jumlah sumber daya.



- d. Informasi tentang situasi keuangan dengan keadaan perusahaan
- e. Membuat laporan keuangan sesuai dengan sumber pendapat jangka Panjang dan jangka pendek.

Akuntansi sektor publik atau ASP merupakan hal fundamental yang diperlukan pada penyusunan laporan keuangan untuk menegakkan akuntabilitas publik. Arti dari akuntansi dan laporan keuangan adalah sebuah proses, pengolahan, dikumpulkannya bukti transaksi, ataupun sebuah bentuk komunikasi serta informasi untuk menilai kinerja organisasi juga bermanfaat pada pertimbangan mengambil keputusan. Organisasi Sektor Publik (OSP) diharuskan mampu menghasilkan laporan keuangan eksternal seperti laporan keuangan formal yang terdiri dari Laporan Surplus/Defisit, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Rugi/Laba. Dan laporan kinerja yaitu laporan dalam ukuran non-finansial dan finansial (Mia et al., 2016).

#### **PP Nomor 71 Tahun 2010**

Dengan berlakunya PP Nomor 71 Tahun 2010, sehingga PP Nomor 24 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual (*accrual basic*) bisa dilakukan secara bertahap. Pemerintah mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis kas (*cash basic*) menuju akrual paling lambat tahun 2015. Pengaturan PP Nomor 71 Tahun 2010 tidak hanya mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan basis akrual (*accrual basic*), tetapi juga Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis kas (*cash basic*) menuju akrual yang sekarang masih digunakan disemua perusahaan atau instansi.

Keputusan PP Nomor 71 pasal 1 (8) Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah dasar untuk mencatat aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan pengeluaran dalam pelaporan keuangan berbasis akrual (*accrual basic*). Sama halnya dengan pencatatan pendapatan, pembiayaan, dan pengeluaran pada saat pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Badan Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) memfinalisasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada tahun 2010 dan menerbitkannya kedalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Oleh karena itu, maksimal tahun 2015 semua pelaporan keuangan pemerintah daerah dan pusat harus menggunakan basis akrual (*accrual basic*) dalam pencatatannya. Tujuan dari penerapan tersebut supaya lebih *accountable* dan semakin berkualitasnya laporan keuangan.

Laporan keuangan mempunyai karakteristik kualitatif yang memiliki pengertian suatu ukuran preskriptif terkandung pada informasi pencapaian tujuan akuntansi. Empat sifat kualitatif dari laporan keuangan yang merupakan persyaratan prospektif tersebut tercantum dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dengan tujuan dapat mencapai kualitas yang diinginkan seperti relevan, bisa diandalkan, sebanding, bisa dimengerti. Berikut penjelasan terkait karakteristiknya (BPK, 2010)

##### **a. Relevan**

Jika pada penyajian laporan keuangan informasi yang terdapat didalamnya berguna untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu atau saat ini, memperkirakan kejadian masa depan, juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan suatu instansi atau orang yang terkait dengan mengkonfirmasi dan digunakan untuk pengoreksian masa lalu, maka laporan keuangan mampu dikatakan relevan. Dengan cara ini, informasi akhir yang relevan dapat dikaitkan dengan tujuan penggunaan. Informasi terkait tersebut seperti:

1. Ada nilai *feedback*. Artinya, informasi yang ada dapat digunakan dalam mengkonfirmasi dan pengoreksian harapan sebelumnya.
2. Memiliki nilai prediksi. Dengan kata lain, informasi mampu menjadi prediksi masa depan atas hasil masa lalu atau peristiwa yang sedang terjadi oleh pengguna.



3. *Ontime* berarti bahwa penyajian laporan keuangan dilakukan tepat waktu sehingga informasi dapat membantu dan mempengaruhi pengguna pada saat pengambilan keputusan.
4. Lengkap artinya penyajian laporan keuangan sudah lengkap sehingga informasi yang terkandung didalamnya dapat menjadi pertimbangan saat pengambilan keputusan karena terdapat batasan-batasan yang diperhatikan. Dan adanya informasi yang lengkap dapat meminimalisir kesalahan pahaman oleh pengguna laporan keuangan.

b. Andal

Dapat diandalkan mempunyai arti bahwa informasi yang ada dalam laporan keuangan valid, tidak menyesatkan, tidak menimbulkan kesalahan pahaman atau kesalahan material, benar dalam segala hal, dan dapat diverifikasi. Informasi pada laporan keuangan bisa dikatakan relevan namun belum tentu dapat diandalkan karena mungkin informasi yang disajikan tidak valid. Oleh sebab itu terdapat karakteristik yang harus dipenuhi supaya informasi dalam laporan keuangan dapat diandalkan, karakteristik tersebut sebagai berikut :

1. Penyajian untuk informasi dilakukan dengan niat dan tujuan baik yang menjelaskan transaksi dan peristiwa lain tersebut secara wajar dan apa adanya.
2. Laporan keuangan yang ada dapat disinkronisasi yang artinya informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat diverifikasi dan menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda secara material ketika pengujian dilaksanakan lebih dari satu kali oleh pengguna yang berbeda.
3. Laporan keuangan yang ada disajikan secara netral yang berarti informasi yang terkandung didalamnya memperhatikan kebutuhan bersama bukan untuk kebutuhan pribadi atau pihak tertentu.

c. Bisa dibandingkan

Bisa dibandingkan memiliki makna bahwa informasi yang terdapat pada laporan keuangan periode sebelumnya ataupun laporan keuangan umum entitas lain dapat dibandingkan dengan laporan keuangan saat ini, karena jika terdapat perbandingan maka akan memberikan manfaat seperti evaluasi untuk laporan keuangan periode mendatang. Suatu kebijakan akuntansi dibuat untuk menjadi pedoman perbandingan dari tahun ke tahun. Jika pelaporan menggunakan kebijakan akuntansi yang lebih unggul daripada yang digunakan saat ini, maka perubahan akan diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Bisa dipahami

Mampu dimengerti merupakan pemahaman pengguna saat melihat informasi pada penyajian laporan keuangan bisa dimengerti dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Dengan demikian, pengguna diharapkan mempunyai pemahaman yang wajar mengenai kegiatan dan lingkungan operasional entitas pelapor dan ketersediaan mereka untuk mempelajari informasi yang saling berkaitan.

**Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis akrual (*accrual basic*)**

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip akuntansi yang berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP mengatur cara menyusun serta menyajikan laporan keuangan berbasis akrual (*accrual basic*). Sejak tahun 2015 Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 lebih mengatur model akuntansi akrual. Dengan penegasan seperti anggaran harus ada pada akuntansi, adanya akun ekuitas (ekuitas, mengkonsolidasikan ekuitas, ekuitas SAL), akun yang dilawankan pada estimasi perubahan SAL khususnya transaksi yang berhubungan pada LRA, kewajiban SKPD membuat laporan keuangan, pertanggungjawaban atas belanja yang diakui yang telah disahkan anggaran, dan kewajiban mengakui beban saat sudah timbul kewajiban.





Terdapat perubahan dalam akuntansi pemerintah yang berawal dari akuntansi pemerintah tradisional dengan menggunakan basis kas (*cash basic*) berupa pencatatan *single entry* ke akuntansi modern. Setelah itu reformasi dilakukan pada penggunaan akuntansi pemerintah untuk menyediakan pelaporan keuangan yang berarti. Salah satu pilihannya adalah lembaga pemerintahan baik itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat diwajibkan untuk membuat catatan keuangan berbasis akrual (*accrual basic*) (Nasution, 2018). PP Nomor 71 pasal 1 ayat (8) Tahun 2010 menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berbasis akrual (*accrual basic*) merupakan pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan modal pada laporan keuangan berbasis akrual (*accrual basic*). Pendapatan dan belanja dalam pelaporan anggaran, yang pelaporan pelaksanaannya berlandaskan dengan basis yang telah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN).

### **Basis akrual (*accrual basic*)**

Basis akrual (*accrual basic*) merupakan sebuah basis akuntansi yang mengakui, menyajikan, dan mencatat suatu laporan keuangan atas transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi yang terjadi, terlepas dari kapan kas dibayarkan atau diterima. Terdapat beberapa manfaat jika menerapkan akuntansi basis akrual (*accrual basic*) pada penyajian laporan keuangan, seperti sebagai berikut :

- a. Memberikan pandangan tentang cara pemerintah mendanai kegiatannya serta bagaimana memenuhi pendanaan dalam kegiatannya.
  - b. Menyajikan suatu informasi mengenai hak dan kewajiban instansi yang terkait secara akurat dan nyata.
  - c. Membantu menilai kinerja pemerintah dalam hal biaya layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.
  - d. Menunjukkan bagaimana kondisi keuangan pemerintah serta perubahan posisi keuangannya. Tidak hanya manfaatnya saja, namun terdapat beberapa kekurangan atas penerapan akuntansi basis akrual (*accrual basic*), antara lain :
- a. Perlunya kesiapan untuk mengatasi masalah-masalah seperti biaya penilaian aset, biaya penyusunan atas kebijakan akuntansi, biaya pembangunan sistem computer, dan biaya lainnya. Karena biaya tersebut cukup mahal.
  - b. Akuntansi basis akrual (*accrual basic*) kurang memiliki arti bagi pemerintah karena pada dasarnya basis ini digunakan untuk mengukur keuntungan.
  - c. Membutuhkan keleluasaan yang lebih besar dalam hal pertimbangan professional.

Karena akuntansi basis akrual (*accrual basic*) bersifat kompleks sehingga kurang mendapat perhatian dalam penelaahan sehingga untuk akuntabilitas laporan keuangan berkurang sehingga perlunya pemilihan strategi implementasi akuntansi berbasis akrual (*accrual basic*) yang dapat dicermati, supaya penerapan dari basis akrual (*accrual basic*) berhasil. (Mua'am, 2015) Pemilihan strategi tersebut menurut antara lain :

- a. Komitmen politik yang merupakan kunci dari penerapan basis akrual (*accrual basic*).
- b. Selalu mengkomunikasikan tujuan yang akan dicapai.
- c. Penerapan akuntansi basis akrual (*accrual basic*) yang membutuhkan seorang akuntan yang andal serta memadainya sistem informasi akuntansi.
- d. Adanya reformasi birokrasi yang menerapkan basis akrual (*accrual basic*).

### **Kualitas**

Kualitas merupakan sebuah tolak ukur baik dan tidaknya suatu hal. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang praktik akuntansi pemerintah, laporan keuangan pemerintah bisa dibilang memiliki kualitas apabila laporan tersebut dapat diandalkan, relevan, mudah dimengerti, serta bisa dibandingkan. Kualitas pelaporan keuangan menunjukkan bahwa kepala



daerah mampu bertanggungjawab saat menjalankan tugasnya saat mengelola organisasinya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan. Kualitas merupakan penilaian output dari kinerja pusat pertanggungjawaban pada suatu tindakan, baik pada sisi yang berwujud misalkan produk maupun sisi tidak berwujud misalkan sebuah kegiatan. Pentingnya kualitas karena didalamnya terdapat informasi yang penting terutama dilaporan keuangan, sehingga seseorang atau pemakainya akan cepat memahami apa isi serta maksud dari laporan keuangan tersebut. sehingga menyajikan laporan keuangan sangat bermanfaat seperti menjadi bentuk pertimbangan dalam mengambil keputusan, sebagai alat akuntabilitas, dan bisa menjadi informasi pada pengevaluasian kinerja organisasi (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010).

### **Laporan Keuangan**

Tujuan disusunnya sebuah laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi yang saling berkaitan dengan keadaan keuangan entitas pelapor pada kurun waktu tertentu. Laporan keuangan, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran tertentu (Niu et al., 2014). Untuk mengevaluasi situasi keuangan, membantu menentukan ketentuan terhadap peraturan peundang-undang, dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas suatu entitas pelaporan. Berdasarkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan daerah merupakan laporan yang tersusun dan berisi status keuangan dan transaksi entitas pelapor. Penggunaan pelaporan keuangan pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah, pejabat terpilih, badan pengatur, badan audit, seseorang yang menyediakan dan terlibat pada penginvestasian atau pinjaman, dan pemerintah. Badan Standar Akuntansi Pemerintahan (BSAP) (2007:81) mengungkapkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah merupakan kolaborasi dari semua laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) sebagai PPKD/BUD. (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010) mengemukakan bahwa komponen-komponen dari laporan keuangan harus memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berisi tentang kondisi dana mulai dari sumbernya, pengalokasian serta rincian menggunakan dana yang dikelola pemerintah daerah ataupun pusat, dengan memperlihatkan perbandingan anggaran dan realisasi selama periode pelaporan. Hal-hal yang langsung tercakup dalam LRA yaitu pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan.
- b. Laporan Perubahan Ekuitas memberikan informasi perbandingan ekuitas pada tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya terkait naik dan turunnya ekuitas.
- c. Laporan Operasional (LO) memberikan gambaran mengenai sumber daya ekonomi penggalangan modal dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah ataupun pusat yang dipergunakan saat menyelenggarakan kegiatan pemerintah pusat ataupun daerah selama periode pelaporan. Item yang langsung dimasukkan pada laporan operasional muali dari pendapatan-LO, beban, transfer dan pos-pos luar biasa.
- d. Neraca berisi tentang penggambaran kondisi keuangan yang terdiri dari harta (*asset*), kewajiban (*liability*), modal (*equitas*).
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran (Laporan perubahan SAL) adalah penggambaran untuk naik dan turunnya saldo anggaran lebih dari perbandingan tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya.
- f. Laporan Arus Kas (LAK) memuat informasi tentang penggambaran saldo awal, pendapatan, investasi, kas keluar yang berkaitan pada kegiatan operasi, pembiayaan, dan saldo akhir pemerintah daerah ataupun pusat selama periode yang ditentukan. Penerimaan kas dan pengeluaran kas merupakan pos-pos yang terdapat pada Laporan Arus Kas (LAK).



- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) memberikan penjelasan dan rincian tentang angka-angka yang ditunjukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LAK), Laporan Perubahan Saldo (Laporan Perubahan SAL), Laporan Operasi (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK). Serta berisi informasi terkait kebijakan akuntansi dan informasi lain yang dianjurkan atau diterapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk diungkapkan oleh entitas pelaporan. Agar penyajian pada laporan keuangan tepat atau wajar.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lebih tepatnya menggunakan penelitian kepustakaan atau disebut library research, dengan memakai data sekunder dari jurnal penelitian dari peneliti terdahulu melalui media Google Scholar. Metode kualitatif merupakan pemahaman dan penafsiran terhadap suatu kejadian atau perilaku manusia pada keadaan tertentu berdasarkan pandangan peneliti itu sendiri. Yang memiliki tujuan untuk mengembangkan permasalahan yang sedang dihadapi, atau menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan penelusuran teori, dengan cara mengumpulkan data sampai data yang dikumpulkan sesuai dengan harapan. Terdapat lima macam metode kualitatif yang biasa digunakan yaitu metode Observasi, analisis percakapan, analisis wacana, analisis isi, dan pengumpulan data etnografi. Pengertian dari metode kualitatif khususnya untuk kajian Pustaka merupakan suatu teknik yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian dengan proses ilmiah yang menghasilkan output dalam bentuk laporan untuk penelitian ilmiah dan memfokuskan pada sebuah studi dan suatu topik tertentu.

Cahyono et al. (2019) mengemukakan bahwa seorang peneliti harus memperhatikan lima tahap persiapan dan penulisan. Secara umum, ada 5 langkah mempersiapkan pencarian bibliografi diantaranya :

- a. Mencari literatur terkait, beberapa sumber yang bisa diakses untuk mendapatkan referensi penelitian misalkan melalui *Library Catalog*, *Google Scholar*, *EBSCO*, dan *Medline*.
- b. Mengevaluasi sumber penelitian literatur.
- c. Mengidentifikasi masalah dan kesenjangan, jika ada antara teori dan kondisi lapangan. Secara singkat membuat struktur atau kerangka dari sebuah artikel.
- d. Kemudian membuat tinjauan literatur.

Berikut gambaran kosep metodologi penelitian untuk artikel ini :

- a. Mencari, mengumpulkan, dan menelusuri informasi terkait melalui *google scholar*, *website* dan pendukung lainnya.
- b. Hasil yang sesuai dengan kata kunci sejumlah 18 jurnal dan 6 Peraturan Pemerintah (PP) atau Undang-Undang (UU) pendukung sebagai referensi.
- c. Kemudian dari hasil tersebut membuat analisis dan kerangka artikel penelitian.
- d. Setelah terdapat hasil dan pembahasannya kemudian membuat kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Juwita (2013) mengemukakan dalam penelitiannya bahwa laporan keuangan pemerintahan memuat informasi yang sangat bermanfaat bagi pemakainya, sehingga informasi yang disajikan harus mampu dipahami dan disajikan dengan tepat. Dari penelitiannya dapat diuraikan bahwa implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Jawa Barat telah menunjukkan bahwa sebagian besar pendekatan, evaluasi, penyajian, serta pengungkapan Standar Akuntansi





Pemerintah (SAP) dalam proses penyusunan laporan keuangan telah diselenggarakan dengan baik.

Mia et al (2016) mengungkapkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan suatu pedoman akuntansi yang diimplementasikan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan sesuai dengan penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010. Temuannya memperlihatkan bahwa pengguna Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Artinya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mempunyai pengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) di Kota Semarang. Sama halnya dengan penelitian (Umar, dkk. 2018) yang mengungkapkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan, dibuktikan dengan nilai koefisien regresi yang positif. Penerapan perubahan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) setiap satu tingkat memberikan dampak senilai 0,301 terhadap tingkat kualitas penyajian laporan keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo.

Ramadhan (2019) menjelaskan bahwa standar akuntansi pemerintah dibutuhkan pada proses pengerjaan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) dalam bentuk laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan pada umumnya masih banyak yang belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah diputuskan. Salah satunya di Kabupaten Serdang bedagai yang terletak di Sulawesi Utara untuk laporan keuangannya masih banyak koreksi terkait standar akuntansi keuangan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) PP Nomor 71 Tahun 2010 bertujuan untuk mengembangkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, dan laporan keuangan yang dihasilkan harus mencakup keadaan keuangan, kinerja dan memuat informasi tentang perubahan keadaan keuangan. Akuntabilitas pengguna membantu pengambilan keputusan. Berdasarkan uji hipotesis menggunakan regresi sederhana, penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian gelar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Serdang Begadai. Analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memiliki pengaruh 80,4% terhadap perubahan kualitas penyajian laporan keuangan.

Rahmawati et al (2018) menjelaskan bahwa Pemerintah daerah sebagaimana disyaratkan oleh PP Nomor 71 tahun 2010, mengungkapkan bahwa penjelasan yang dimuat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah memenuhi standar kualitatif laporan keuangan pemerintah, pengelolaan keuangannya telah mencapai transparansi dan akuntabilitas. Karakteristik kualitatif pelaporan keuangan pemerintah adalah persyaratan preskriptif yang dibutuhkan supaya laporan keuangan pemerintah dapat mencapai kualitas yang diharapkan: relevansi, keandalan, daya banding, serta mudah untuk dipahami. Standar akuntansi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas akuntansi tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Tangerang Selatan berdasarkan penelitian yang ditemukan tersebut.

Mentu & Sondakh (2016) mengemukakan dalam hasil survei penelitiannya bahwa pada penyajian laporan tahunan Badan Pendapatan Daerah serta Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara masih menggunakan *case to accrual* atau yang ditetapkan PP Nomor 24 Tahun 2005, dan belum menerapkan akuntansi akrual (*accrual basic*) berimbang dengan PP 71 Tahun 2010. Pada PP Nomor 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), penyajian laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari tujuh laporan keuangan yaitu neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo (Laporan Perubahan SAL), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Di sisi lain, Dinas Keuangan dan Dinas Sosial Sulawesi Utara



hanya menyajikan neraca, laporan pelaksanaan anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Namun, penyajiannya telah sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010.

Sitorus et al (2015) mengemukakan bahwa suatu tata kelola keuangan negara harus diperbaharui sebagai upaya pemerintah dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas. Adanya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mampu menaikkan mutu kualitas pengelolaan keuangan negara. Pada penelitiannya menunjukkan bahwa Dalam tahap persiapan pengenalan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual (*accrual basic*), Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon mulai memaparkan tentang latar belakang dan perubahan akuntansi kas sehubungan dengan akuntansi basis akrual (*accrual basic*) dan perbedaan antara akuntansi menuju akrual ke akuntansi *accrual basic* dan kemudian ke penerapan akuntansi basis akrual (*accrual basic*).

Hasil peneliti terdahulu telah memberikan gambaran bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mempunyai pengaruh cukup besar terhadap proses penyajian laporan keuangan, namun untuk penerapan dari PP Nomor 71 Tahun 2010 terkait basis akrual (*accrual basic*) pada laporan keuangan instansi pemerintahan belum diterapkan secara menyeluruh yang berarti masih banyak instansi pemerintah baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat yang menggunakan akuntansi berbasis kas (*cash basic*). Jika dilihat dari kelebihan, basis kas (*cash basic*) sendiri sangat mudah dimengerti serta terlihat dari laporannya yang disajikan secara jelas dari mana sumber keuangan yang ada.

Akuntansi basis akrual (*accrual basic*) juga memiliki kelebihan yang harus diketahui seperti lebih akurat dalam penggambaran keadaan keuangan suatu instansi serta mampu menjadi pertimbangan dan penilaian pada kinerja instansi atau perusahaan yang dimaksudkan. Namun beberapa instansi pemerintah baik itu dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat belum bisa menerapkan akuntansi basis akrual (*accrual basic*) ini seperti yang tertuang dalam PP nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual (*accrual basic*). Hal ini dikarenakan masih banyak dibutuhkannya persiapan dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ataupun pegawai yang berhubungan langsung pada proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan akuntansi berbasis akrual (*accrual basic*).

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Akuntansi Sektor Publik (ASP) mempunyai kegunaan yang sangat fundamental dalam mempersiapkan laporan keuangan terutama dalam pelaksanaan akuntabilitas publik. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan pedoman dan prinsip akuntansi yang diterapkan pada saat proses menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Akuntansi serta laporan keuangan memiliki makna sebagai suatu proses mengumpulkan, mengolah sebuah informasi untuk menilai kinerja organisasi atau bermanfaat pada pengambilan keputusan. Sehingga berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan wajib memenuhi standar kualitatif seperti relevan, terpercaya, mudah dipahami, serta bisa dibandingkan. Berdasarkan pembahasan diatas, bahwa saat proses penyajian laporan keuangan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memiliki pengaruh terhadap performa laporan keuangan yang dimanifestasikan. Namun untuk penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terkait dengan akuntansi berbasis akrual (*accrual basic*) pada laporan keuangan yang ada, masih banyak instansi pemerintah yang belum menerapkannya karena banyaknya kendala terutama pada Sumber Daya Manusia (SDM) dimana SDM yang ada, masih belum cukup siap ataupun mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan seperti harus memiliki ilmu atau pendidikan yang sebidang dan sesuai. Serta masih kurangnya



pembaharuan pada tata kelola keuangan sebagai upaya pemerintah dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Adapun strategi yang dapat diupayakan dalam mempermudah penerapan basis akrual (*accrual basic*), yaitu komitmen politik, selalu mengkomunikasikan sebuah tujuan yang akan dicapai, perlunya seorang akuntan yang andal dalam penerapan akuntansi basis akrual (*accrual basic*) serta memadainya sistem informasi akuntansi, dan adanya reformasi birokrasi yang menerapkan basis akrual (*accrual basic*).

### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dengan menggunakan metode *library research*, saran yang bisa diberikan oleh peneliti adalah :

1. Untuk pemerintahan yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan baik, diharapkan mampu mempertahankan konsistensinya serta terus melakukan sosialisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar kualitas pada laporan keuangan yang disajikan bertahan dan dan semakin baik.
2. Bagi pemerintahan yang akan menyusun laporan keuangan, perlunya melakukan pendidikan serta pelatihan langsung mengenai PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan basis akrual (*accrual basic*) kepada Sumber Daya Manusia SDM yang terkait, dan penempatan untuk SDMnya harus sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Supaya kesalahan saat menyusun serta menyajikan laporan keuangan berbasis akrual (*accrual basic*) dapat diminimalisir.
3. Untuk penelitian berikutnya disarankan untuk memperbanyak sebuah daftar pustaka dalam penelitian, sehingga sumber daftar pustaka dapat diringkaskan dan disajikan dan menjadi pertimbangan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akuba, A. (2013). Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo. Universitas Negeri Gorontalo. Jurnal KIMFEB, 9–16.
- BPK. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Cahyono, E. A., Sutomo, & Harsono, A. (2019). Literatur Review: Panduan Penulisan dan Penyusunan. Jurnal Keperawatan, 12.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (2010).
- Jati, B. P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Wahana, 22(1), 1–14. <https://doi.org/10.35591/whn.v22i1.145>
- Juwita, R. (2013). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Trikonomika, 12(2), 201. <https://doi.org/10.23969/trikononika.v12i2.480>
- Langelo, F., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bitung. Jurnal EMBA, 3(1), 1–8.
- Mentu, E. P., & Sondakh, J. J. (2016). Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Prov. Sulut. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 4(71), 1392–1399.
- Mia, O., Raharjo, K., & Andini, R. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang. Journal of Accounting Of Accounting, 2(2), 2–15.



- Mua'am, A. (2015). Basis Akrua dalam Akuntansi Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Lingkar Widyaismara*, 2(1), 38–46. [www.juliwi.com](http://www.juliwi.com)
- Nasution, D. A. D. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 30–43.
- Niu, F. A. L., Karmoyo, H., & Tangkuman, S. (2014). Analisis penerapan PP. NO. 71 Tahun 2010 dalam penyajian laporan keuangan dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota kotamaibagu. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 2(71), 714–722. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6461>
- NST, D. A. D. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi SAP Berbasis Akrua dengan Komitmen SKPD sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tesis, 18(4), 1–122.
- Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 20(2), 8–17.
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. In *Seminar Nasional Taman Siswa Bima*, 1, 147–153.
- Sitorus, S., Kalangi, L., & Walandouw, S. K. (2015). ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL BERDASARKAN PP. NO. 71 TAHUN 2010 PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KOTA TOMOHON. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 37(3), 343.
- Suprihatin, N. S., & Ananthi, A. A. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(2), 242. <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i2.6218>
- Widiyati, D. (2018). Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(1), 1–14.
- Yafie, M. D. (2013). Penerapan Basis Akrua pada Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 13(1), 104–116.
- Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2018). Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemanfaatan. *Jurnal Bisnis & Ekonomi*, Volume 14,(1), 56–64.